

Lain-lain

Harmonisasi Bantuan untuk Pembangunan yang Berpusat pada Masyarakat



Lembar Informasi Proyek

LIP 4-0-001

Kontribusi dari PBI

Judul Proyek:

Pembangunan Perdamaian Positif

- Pelayanan Perlindungan
- Pendidikan Perdamaian Partisipatif

Presentasi selama pelatihan perdamaian tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diadakan oleh PBI bersama dengan Badan Pemperdayaan Perempuan pada bulan November 2006.

Pendampingan perlindungan waktu pelaksanaan aksi anti kekerasan di kota Wamena.



Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email):



Belakang Kompleks Perumahan DPRD
Kelurahan VIM, Kota Raja
Jayapura

Tel: +62 967 589 191

Fax: +62 967 589 190

Email: pbi_past@yahoo.com

Jl. Bhayangkara, 48A
Wamena

Tel/Fax: +62 0969 32 816

Email: pbi_wamena@yahoo.com

Pendidikan Perdamaian Partisipatif
Perumahan Kota Raja Grand, A21
Jayapura

Tel/Fax: +62 967 854 403

Email: pbi_ppe_papua@yahoo.com

Project Coordinator

Celia Guilford

Tel: +1 204 825 2477

Fax: +1 775 242 5240

Email: pbiip@mts.net

In-Country Coordinator

Naomi Baird

Tel/Fax: +62 274 446 3996

Email: pbi_icc@yahoo.com

Website: www.peacebrigades.org

Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyandang dana):

Confirmed Donors - 2007	Papua dan Papua Barat
PBI Germany - Churches of Hessen-Nassau, Rheinland, Westfalen and the Unified Protestant Mission	18,000
ICCO (Netherlands) '05-2007	41,283
PBI UK Sigrid Rausing Trust	17,217
PBI Country Groups	21,850
Total Confirmed	98,350

Mitra penanggung jawab:

Disponsori oleh Komnas HAM (Nasional Komisi untuk Hak Asasi Manusia)
Status Yayasan disilakan oleh Departemen Hukum & HAM

Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas):**Perkenalan**

Yayasan Bina Perdamaian Internasional Indonesia atau Peace Brigades International (PBI) adalah suatu organisasi internasional yang bekerja bagi transformasi konflik tanpa kekerasan. Pekerjaan PBI didasarkan prinsip-prinsip tanpa kekerasan, tidak berpihak, bersifat internasional, tidak mencampuri persoalan politik serta bekerja secara transparan.

Selama 25 tahun terakhir PBI telah memberikan dukungan fisik dan moral bagi kegiatan perdamaian di berbagai negara. Pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan mengirimkan sukarelawan internasional, berdasarkan undangan dari individu, organisasi atau pemerintah lokal. PBI menolak bekerja sama dengan lembaga ilegal maupun kelompok bersenjata.

Sejak tahun 1999, PBI bekerja di Indonesia atas undangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Wilayah kerja yang telah dicakup PBI sampai saat ini meliputi Timor Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, Flores, Sulawesi, Papua, Papua Barat dan Jakarta, dengan kantor yang bertempat di Jakarta, Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam serta Jayapura dan Wamena, Papua. Kegiatan-kegiatan pokok PBI adalah Pendampingan Perlindungan Internasional dan Pendidikan Perdamaian Partisipatif.

PBI mendapatkan status legal sebagai Yayasan di Indonesia, dengan akta pendirian Yayasan **No. C-110.HT.01.02. Th 2005**, atas nama *Yayasan Bina Perdamaian Internasional Indonesia*.

Bagaimana PBI Bekerja

PBI selalu bertindak hanya berdasarkan undangan dari para individu atau organisasi lokal. PBI hanya akan bekerja bersama dengan individu atau organisasi klien (mitra) setelah permohonan untuk menjadi klien bagi pelayanan PBI diterima dan disetujui oleh kedua belah pihak. Permohonan dinilai dilandaskan pada beberapa prinsip dasar termasuk: 1) penolakan terhadap penggunaan kekerasan, 2) komitmen terhadap pengembangan perdamaian, 3) bekerja secara legal dan resmi. PBI masih memberikan pelayanan-pelayanan kepada para mantan klien PBI maksimal sampai dengan setahun setelah kontrak klien tersebut habis.

Agar supaya pelaksanaan tugas PBI menjadi efisien dan efektif, PBI membina hubungan kerja yang baik dengan semua otoritas setempat baik sipil, kepolisian, maupun militer. Adanya jaringan yang kuat dengan segala otoritas yang bersangkutan merupakan unsur penting yang menunjang kemampuan PBI dalam menangkal dan mencegah kekerasan. Oleh karena itu, maka PBI senantiasa bekerja secara terbuka dan transparan serta menginformasikan otoritas yang bersangkutan mengenai segala kegiatan relevan yang dilakukan oleh PBI.

Amanat / Tujuan dari Proyek Indonesia

- Mendukung suasana damai bagi masyarakat sipil untuk terus berkarya dan berkembang
- Menciptakan dan mengembangkan model penyelesaian permasalahan tanpa kekerasan
- Membantu mengembangkan dialog sosial, politik dan rekonsiliasi
- Meningkatkan pemahaman secara luas mengenai situasi di Indonesia

Memberdayakan segala lapisan masyarakat sipil, yang mana pada saat yang sama mengurangi kebutuhan keberadaan PBI

Kegiatan pokok PBI di Papua dan Papua Barat

- Mensosialisasikan pelayanan PBI kepada otoritas, calon klien, dan pihak-pihak lain yang bersangkutan
- Memperkuat jaringan yang dapat mencegah kekerasan di Papua dan Papua Barat
- Menilai permohonan-permohonan untuk menjadi klien PBI yang sesuai
- Memberikan/menyediakan pelayanan perlindungan internasional bagi organisasi-organisasi atau individu-individu klien PBI yang bekerja di Papua dan Papua Barat
- Mempersiapkan dan melaksanakan pelatihan pendidikan perdamaian partisipatif
- Memfasilitasi diskusi-diskusi untuk mendukung penciptaan budaya perdamaian
- Pembukaan dua perpustakaan perdamaian
- Pemutaran film yang berkaitan dengan topik perdamaian
- Menilai kegiatan alternatif untuk pembangunan perdamaian.
- Menilai kebutuhan dan kecocokan penyediaan pelayanan-pelayanan PBI kepada aktor-aktor yang berada di Papua dan Papua Barat

Ruang lingkup fokus/sektor yang didukung: (Check one)

- 1-1 Asupan makanan dan gizi
- 1-2 Kesehatan
- 1-3 Pendidikan
- 1-4 Ekonomi Lokal
- 1-5 Kesetaraan Gender
- 1-6 Infrastruktur Dasar
- 1-7 Pengembangan Kapasitas di tingkat desa
- 2-0 Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan
- 3-0 Pelatihan Keterampilan/ Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 4-0 Lain-lain

Lokasi/ruang lingkup wilayah: (Check working area level, and list the name of the places)

- Provinsi:
- Kabupaten:
- Kota:
- Distrik(Kecamatan):
- Kampung/Desa:

Provinsi	Papua	Papua Barat
Kabupaten	Jayapura Jayawijaya Merauke Mimika	Manokwari Sorong
Kota		
Distrik (Kecamatan)		
Kampung / Desa		

Jayapura dan Abepura, Wamena dan Jayawijaya, Manokwari, Merauke, Sorong Direncanakan untuk masa depan: Timika dan Agats

Kadang-kadang pelayanannya disediakan di daerah lain kalau permohonan diterima

Pola Pelaksanaan:**Kerja Pembangunan Perdamaian Positif PBI di Indonesia
Pendampingan Perlindungan**

PBI memberikan pelayanan perlindungan kepada 10 organisasi klien (mitra) di Banda Aceh, Jayapura, Wamena, Manokwari dan Jakarta. Pelayanan ini termasuk pendampingan perlindungan secara fisik di lapangan, di kota atau di kantor, panggilan telepon rutin, dan menjadi juru hubung pejabat-pejabat lokal dan regional.

Di Papua, PBI bekerja bersama dengan mitra-mitra berikutnya: KontraS Papua (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) dari Jayapura, PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia) dari Jakarta, LP3BH (Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum) dari Manokwari, Theo Hesegegem (mitra individu) dari Wamena dan SKP (Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura) dengan kantor pusat di Jayapura dan cabang-cabang di Merauke, Sorong, Timika dan Agats.

Workshop-Workshop Perdamaian

Bagian lain dari program unik PBI adalah penyelenggaraan workshop-workshop perdamaian dan pelatihan pendidikan perdamaian. PBI bekerja dengan fasilitator-fasilitator lokal untuk mengembangkan jaringan yang kuat serta kapasitas bagi resolusi konflik di antara organisasi-organisasi lokal, pejabat-pejabat sipil dan kelompok-kelompok agama. Workshop-workshop tersebut membuka jalan untuk memperkuat dan memberdayakan masyarakat sipil dengan cara kerja dengan metode-metode resolusi konflik lokal dan adat istiadat setempat. Workshop-workshop sebelumnya telah dilaksanakan di Flores tengah dan bagian timur Flores, Timor Barat, Aceh, Medan, Makassar, Jakarta dan Jayapura.

Diskusi-diskusi Perdamaian

PBI telah menyelenggarakan diskusi-diskusi perdamaian di setiap kantor tim lapangannya mengenai isu-isu seperti peran-peran perempuan dalam pembangunan perdamaian dan mekanisme lokal tradisional (adat) dalam menghadapi konflik. Diskusi-diskusi tersebut telah dihadiri oleh masyarakat sipil lokal, dan isinya ditentukan oleh para peserta dan fasilitator lokal dengan masukan dari anggota-anggota tim PBI. Diskusi-diskusi sejenisnya telah dimulai di Jayapura, Banda Aceh dan Wamena.

Pertunjukan Film dan Perpustakaan Perdamaian

PBI menyelenggarakan pertunjukan film yang berkaitan dengan topik perdamaian di setiap kantor tim lapangannya. Pemutaran tersebut biasanya dilanjutkan dengan diskusi mengenai isu-isu yang dikemukakan melalui filmnya. Tim Pendidikan Perdamaian Partisipatif di Jayapura dan Tim PBI di Wamena telah membuka perpustakaan perdamaian umum yang menyediakan pelbagai sumber bacaan dan audio visual tentang budaya damai untuk masyarakat.

"Diskusi ini bisa membawa kita bersama untuk berpikir tentang pentingnya nilai tradisi-tradisi. Bagaimana tradisi-tradisi tersebut bisa digunakan dan dihormati. Bagaimana sumber-sumber masalah bisa diselesaikan melalui hukum-hukum tradisional. Saya harap PBI akan memberikan lebih banyak Pendidikan Perdamaian. Saya harap bahwa budaya perdamaian yang tradisional dari setiap daerah juga akan kembali bangkit."

Ibu Mientje dari Universitas Cenderawasih dan anggota MRP.

"Kehadiran PBI secara fisik dalam sidang pengadilan Hak-Hak Asasi Manusia di Makassar memberikan kami perasaan aman dan dukungan moral. Bagi kami, dan khususnya bagi para korban penyiksaan, kehadiran PBI menunjukkan kepada kami bahwa masyarakat internasional tidak sepenuhnya melupakan kami. Korban-korban tersebut sangat berterima kasih bahwa kalian (PBI) berada di pengadilan tersebut"

Maya, PBHI, setelah pendampingan perlindungan

"Karena kerja saya sebagai aktivis hak-hak asasi manusia, saya pernah diintimidasi, diteror dan ditahan. Saya pernah dievakuasi dalam pesawat muatan barang dan bahkan berpikir harus meninggalkan negara ini. Sejak PBI melakukan perlindungan kepada saya, saya merasa jauh lebih aman. Saya bisa bekerja dengan lebih percaya diri dan terbuka, saya tidak harus bersembunyi lagi."

Matius Murib, KontraS Papua

Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:

■ Rencana PBI di Jayapura:

Tim PBI di Jayapura sudah bekerja di Papua dan Papua Barat selama tiga tahun, yaitu sejak bulan Maret 2004. PBI di Jayapura memberikan pendampingan perlindungan dan pelayanan perlindungan lainnya kepada mitra-mitra PBI. Pendampingan perlindungan dan pelayanan perlindungan lainnya telah diberikan kepada anggota-anggota KontraS Papua (dari Jayapura), PBHI (dari Jakarta) dan LP3BH (dari Manokwari) dan SKP (kantor pusat di Jayapura, cabang-cabang di Merauke, Sorong, Timika dan Agats) di Jayapura, Abepura, Wamena, Manokwari, Bintuni, Wasior dan Makassar. Supaya pelaksanaan tugas PBI efisien dan efektif, PBI menghendaki pembangunan hubungan kerja yang baik dengan semua otoritas setempat baik sipil, kepolisian, maupun militer. Adanya jaringan yang kuat dengan segala otoritas yang bersangkutan merupakan unsur yang penting terhadap kemampuan PBI menangkal dan mencegah kekerasan.

Selain program pelayanan perlindungan, Tim PBI di Jayapura juga melaksanakan program pendidikan perdamaian partisipatif. Tujuan pendidikan perdamaian partisipatif adalah mempromosikan penyelesaian konflik tanpa kekerasan, dan mempercepat proses pembangunan perdamaian melalui pemberdayaan masyarakat sipil dengan metode partisipatif. Metode tersebut berfokus pada pengalaman para peserta, ketrampilan dan kearifan lokal dan adat istiadat setempat. Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sukses di Jayapura adalah: pelatihan transformasi konflik dan diskusi perdamaian yang membangun inisiatif lokal dalam bentuk dialog antara komunitas setempat, pemutaran film, pembukaan perpustakaan yang menyediakan pelbagai sumber bacaan dan audio visual tentang budaya damai, dan penyelenggaraan kegiatan untuk Hari Perdamaian Internasional bersama sebuah koalisi LSM lokal. Berdasarkan prinsip pembangunan kapasitas setempat, PBI bekerja sama fasilitator dan nara sumber lokal. Sejak bulan Mei 2006 adalah tim di Jayapura yang bekerja khususnya untuk pelaksanaan Program Pendidikan Perdamaian Partisipatif. Tim tersebut mengadakan perpustakaan, pelatihan transformasi konflik, diskusi perdamaian dan pemutaran film atas permintaan dari organisasi atau individu dari Jayapura maupun dari daerah lain.

Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:

Pertunjukan film dan diskusi perdamaian

Pemutaran film dan pelatihan perdamaian

Selama tahun 2006 Tim Pendidikan Perdamaian Partisipatif (PPP) Jayapura mengadakan 8 pemutaran film sebagai bagian dari program Pendidikan Perdamaian Partisipatif. Para peserta dari LSM-LSM lokal, gereja-gereja, otoritas dari pemerintah lokal dan mahasiswa-mahasiswa ikut pemutaran film tentang macam-macam topic yang berkaitan dengan transformasi konflik. Pemutaran film selalu dilanjutkan dengan diskusi. Pada bulan October 2006 Tim PPP Jayapura bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan nara sumber lokal mengadakan satu semiar harian tentang Budaya Perdamaian di Papua yang dihadiri oleh peserta dari LSM lokal, kaum agama dan para mahasiswa. Pada bulan November 2006 Tim PPP Jayapura bersama Badan Pemberdayaan Perempuan dan nara sumber lokal menyelenggarakan pelatihan perdamaian tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Dengan pelatihan tersebut PBI membuka ruang untuk para peserta dari LSM, gereja, pemerintahan, kepolisian dan adat sehingga kapasitas dan pengetahuan setempat tentang penghentian KDRT bisa saling ditukar dan dibangun.

Perpustakaan Perdamaian

Tim Jayapura telah memperluas perpustakaan perdamaian sampai 500 buku-buku, laporan-laporan dan materi mengenai pembangunan perdamaian, transformasi konflik secara damai, gender, hukum dan pendidikan perdamaian. Selain itu ada juga media interaktif tentang aksi tanpa kekerasan dan topik lain yang berkaitan dengan perdamaian di Bahasa Indonesia dan di Bahasa Inggris.



1. Perpustakaan Perdamaian di kantor PBI Pendidikan Perdamaian Partisipatif di Jayapura



2. Pemantauan keadaan anggota-anggota organisasi mitra kami waktu mereka membela klien mereka di Pengadilan Abepura.

Pendampingan perlindungan:

Pada tanggal 14 dan 19 Juni dan pada tanggal 8 dan 9 September 2005 PBI mendampingi PBHI, organisasi mitra PBI, di sidang di Pengadilan HAM di Makassar, Sulawesi Selatan mengenai kasus Abepura tahun 2000.

PBHI, salah satu anggota koalisi LSM untuk korban kasus Abepura, meminta pendampingan perlindungan dari PBI waktu mereka (PBHI dan LSM lain) mendampingi dan mewakili para saksi.

Apa yang dikatakan oleh salah satu anggota organisasi mitra PBI terhadap pendampingan tersebut:

“Sejak PBHI menjadi mitra PBI pada tahun 2004, kepercayaan diri diciptakan. Kami merasa aman dan tidak ragu-ragu untuk memperjuangkan HAM. Selama sidang di Pengadilan HAM di Makassar berlangsung kami, yaitu korban-korban, merasa sangat takut untuk kunjungi ke sana karena Makassar bukan tempat sendiri. Tetapi PBI mengadakan jaringan tidak hanya di Papua, Papua Barat dan Jakarta tapi juga di luar negeri. Karena itu kami merasa aman dan bebas untuk berbicara.”

Peneas Lokbere, PBHI/Komunitas Survivor Kasus Abepura, Jayapura, Papua

■ Rencana PBI di Wamena

Menjelang akhir tahun 2004, penilaian kebutuhan dan kecocokan kehadiran PBI dilaksanakan selama empat hari di Wamena, dengan tujuan memahami konteks lokal di Wamena dan menilai keperluan PBI di sana. Berdasarkan jawaban yang sangat positif terhadap penilaian kebutuhan ini, PBI Proyek Indonesia mengambil keputusan untuk menempatkan tim sukarelawan di Wamena pada tahun 2005. Sejak bulan Juli 2005, tim PBI bekerja di Wamena. Kantor PBI di Wamena melaksanakan dua program, yaitu program Pelayanan Perlindungan termasuk Pendampingan Perlindungan Internasional dan Pendidikan Perdamaian Partisipatif. Pada khususnya, PBI akan berfokus pada program Pendidikan Perdamaian Partisipatif di Wamena serta melaksanakan pelbagai kegiatan serupa yang sudah dilakukan dengan sukses di Jayapura: pembukaan sebuah perpustakaan perdamaian yang menyediakan pelbagai sumber bacaan dan audio visual tentang budaya damai, pertunjukan film yang berkaitan dengan topik perdamaian, dan membangun inisiatif lokal dalam bentuk dialog antara komunitas setempat berkaitan dengan budaya damai dalam bentuk diskusi perdamaian. Berdasarkan prinsip pembangunan kapasitas lokal, PBI bekerja bersama organisasi partner setempat yang menaruh minat dan bergerak dalam bidang pembangunan perdamaian. Program Pendampingan Perlindungan Internasional sekarang dilaksanakan atas permohonan klien-klien PBI. Selain itu Tim PBI di Wamena sudah mensosialisasikan rencana PBI di kabupaten Jayawijaya dan kabupaten Yahukimo.



*Diskusi
Perdamaian,
Hari
Perdamaian
Internasional
2006*



*Pembukaan
Perpustakaan*

Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:

Sejak kantor PBI di Wamena dibuka, seorang klien (mitra) baru untuk pelayanan perlindungan diterima dan disetujui, dua diskusi perdamaian dilaksanakan, perpustakaan perdamaian dibuka, film yang berkaitan dengan topik perdamaian diperlihatkan setiap dua minggu, dan empat field trips di luar kota Wamena untuk mensosialisasikan visi dan misi PBI di Papua dilaksanakan. Selain itu, tim di Wamena belajar banyak tentang tantangan dan keuntungan dari pekerjaan di Wamena.

Salah satu hal yang paling penting untuk aktivitas PBI di Wamena adalah bahwa PBI selalu bekerja secara transparan. Strategi itu membuka ruang antara semua pihak dan menjadi efektif untuk memperkembangkan kepercayaan.

Selain itu, field trips yang kami adakan membangun hubungan yang baik antara PBI dan komunitas-komunitas di keliling Wamena, serta memberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang yang jarang datang ke Wamena. Salah satu pengalaman yang paling dihargai oleh tim PBI adalah satu hari setelah kami mensosialisasikan PBI di desa, maka seorang kepala suku jalan kaki selama enam jam untuk mengunjungi kami di kantor. Dia ingin bertemu dengan anggota-anggota PBI secara langsung untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran PBI dan menyampaikan pengalamannya.

Pada tanggal 21 September 2006, PBI merayakan Hari Perdamaian Internasional bersama organisasi dan masyarakat di Wamena.

Pernyataan dari mitra lokal:

“Diskusi perdamaian PBI membuat saya mengerti hal-hal yang saya belum tahu sebelumnya: Adat harus ditulis, karena orang muda tidak begitu sadar tentang aturan-aturannya lagi. Di sini di Pegunungan, kalau seorang mau membantu korban kekerasan dalam rumah tangga, dia akan dicurigai berpihak untuk korban itu dan dilibatkan dalam konflik, apalagi kalau laki-laki. Jadi orang tidak mau mengambil resiko itu, dan hal tersebut merupakan salah satu alasan sulitnya mencari bantuan untuk korban-korban.” *Pendeta Gerda Mofu, GKI, 15 May 2006*

Harmonisasi Bantuan untuk Pembangunan yang Berpusat pada Masyarakat



Lembar Informasi Proyek

LIP 4-0-002

Kontribusi dari **SIL**

<p>Judul Proyek Proyek Budaya (Bahasa) di Propinsi Papua dan Papua Barat</p>	<p>Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email): SIL International P.O. Box 1 Sentani 99352, Jayapura - Papua Phone: (0967) 593 971 Fax : (0967) 593 974 Email: mike_eastwood@sil.org Director – Mike Eastwood</p>						
<p>Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyandang dana): Sumbangan pribadi</p>	<p>Mitra Penanggung-jawab: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Papua dan Papua Barat</p>						
<p>Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas):</p> <p>Tujuan dari Proyek Bahasa di Papua dan Papua Barat adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Memetakan dan mendokumentasikan bahasa-bahasa daerah dan batas-batas bahasa yang ada di Papua dan Papua Barat. ❖ Melestarikan bahasa dan kebudayaan daerah. ❖ Meningkatkan penggunaan bahasa daerah di tiap daerah. ❖ To equip those who have a burden to preserve the local heritage with basic translation techniques and writing skills. <p>Kegiatan-kegiatan dalam Proyek Bahasa adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Survey bahasa-bahasa. . ❖ Lokakarya penerjemah bahasa ibu. ❖ Lokakarya bagi penulis. ❖ Lokakarya untuk penulisan kamus. 							
<p>Ruang lingkup focus/sector yang didukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1-1 Asupan makanan dan gizi <input type="checkbox"/> 1-2 Kesehatan <input type="checkbox"/> 1-3 Pendidikan <input type="checkbox"/> 1-4 Ekonomi Lokal <input type="checkbox"/> 1-5 Kesetaraan Gender <input type="checkbox"/> 1-6 Infrastruktur Dasar <input type="checkbox"/> 1-7 Pengembangan Kapasitas di tingkat desa <input type="checkbox"/> 2-0 Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan 	<p>Lokasi/ruang lingkup wilayah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Provinsi <input type="checkbox"/> Kabupaten <input type="checkbox"/> Kota <input checked="" type="checkbox"/> Distrik/Kecamatan <input checked="" type="checkbox"/> Kampung <table border="1" data-bbox="810 1832 1410 2031"> <tr> <td>Provinsi</td> <td>Papua</td> <td>Papua Barat</td> </tr> <tr> <td>Kabupaten</td> <td>1. Jayapura 2. Paniai 3. Yapen Waropen</td> <td>1. Sorong 2. Sorong Selatan 3. Manokwari</td> </tr> </table>	Provinsi	Papua	Papua Barat	Kabupaten	1. Jayapura 2. Paniai 3. Yapen Waropen	1. Sorong 2. Sorong Selatan 3. Manokwari
Provinsi	Papua	Papua Barat					
Kabupaten	1. Jayapura 2. Paniai 3. Yapen Waropen	1. Sorong 2. Sorong Selatan 3. Manokwari					

<input type="checkbox"/> 3-0 Pelatihan Keterampilan/ Pengembangan Sumber Daya Manusia <input checked="" type="checkbox"/> 4-0 Lain-lain Survey dan pengembangan bahasa	4. Sarmi 5. Pegunungan Bintang 6. Mappi 7. Boven Digoel 8. Jayawijaya 9. Puncak Jaya 10. Yahukimo	
	Kota	
	Distrik (Kecamatan)	
	Kampung / Desa	
Di hampir semua lokasi kerja SIL. Lihat peta di bawah.		
Pola pelaksanaan: <ul style="list-style-type: none"> • Penarikan daftar kosa kata dari bahasa daerah. • Wawancara formal dan informal tentang situasi bahasa dan gambaran umum yang berhubungan dengan wilayah bahasa tertentu. • Melalui program ini, penerjemah dapat membantu masyarakatnya sendiri untuk melestarikan budaya mereka dan mengajarkan teknologi baru. • Ruang dan fasilitas untuk penerjemah tersedia di Pusat Pelatihan SIL. 		
Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan: Dengan adanya survey bahasa maka perencanaan program dan penempatan tim SIL di tiap lokasi menjadi lebih mudah, terarah dan sesuai kebutuhan.		



Figure 1. Participants of Mother Tongue Translation Workshop

Harmonisasi Bantuan untuk Pembangunan yang Berpusat pada Masyarakat



Lembar Informasi Proyek

LIP 4-0-003

Kontribusi dari **SOfeI**

<p>Judul Proyek:</p> <p>Implementasi Rumah Aspirasi sebagai Infrastruktur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Papua dan Papua Barat</p>	<p>Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email):</p> <p>National Democratic Institute (NDI) Jl. Teuku Cik Ditiro No. 37A Pav. Jakarta 10310 Ph.: 021-3107254; 3921617 Fax: 021-3107153 e-mail: paul_r@nd.or.id</p>  <p>Multi Donor Support Office for Eastern Indonesia Jl. Dr. Soetomo No. 26, Makassar 90113, Sulawesi Selatan Tel.: 0411-3650320-23 / Fax. 0411-322049 Email: info@bakti.org</p>
<p>Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyanggah dana):</p> <p>US\$ 1 Juta (untuk 12 propinsi di Kawasan Timur Indonesia) Sumber Dana: DSF</p>	<p>Mitra penanggung jawab:</p> <p>Dewan Perwakilan Daerah (DPD) (Berdasarkan MoU antara DPD dan Bank Dunia tanggal 22 Desember 2004)</p>
<p>Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas):</p> <p>Program "Implementasi Rumah Aspirasi sebagai Infrastruktur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Papua dan Papua Barat" merupakan bagian dari program yang sama yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 12 Provinsi di Kawasan Timur Indonesia.</p> <p>Fase pertama program ini, yaitu studi dan desain, telah diselesaikan pada Bulan Oktober 2005. Program Fase II berupa Implementasi Rumah Aspirasi akan dilaksanakan mulai Maret 2006 s/d Februari 2007.</p> <p>Replikasi program juga sedang dipersiapkan untuk pembentukan Rumah Aspirasi di Kawasan Tengah dan Barat Indonesia.</p> <p>Peran dan Fungsi Rumah Aspirasi di tiap provinsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebagai perpanjangan tangan atau fasilitas penghubung antara DPD dan stakeholder di daerah; - Menjaring, menampung, memilah, verifikasi (investigasi), mengalokasikan atau distribusi aspirasi, melakukan kajian, formulasi aspirasi menjadi konsep akademik (konseptualisasi aspirasi), yang akan menjadi bahan bagi anggota 	

- DPD untuk diperjuangkan menjadi kebijakan (artikulasi aspirasi);
- Mensosialisasikan dan mempublikasikan hasil kerja anggota DPD;
- Memfasilitasi pertemuan dan koordinasi antara anggota DPD dengan pemerintah daerah dan legislatif daerah;
- Menjadi fasilitator dan mediator masyarakat dengan DPD;
- Melakukan program pemberdayaan dan pencerdasan rakyat, khususnya berkaitan dengan pendidikan politik dan demokratisasi;
- Sebagai “balai informasi dan komunikasi” masyarakat dengan DPD;

Komponen Program:

Komponen program pada tingkat provinsi adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan sekretariat (gedung dan peralatan),
- 2) Rekrutmen staf,
- 3) Pelatihan staf,
- 4) Pengembangan rencana kerja dan jaringan informasi dan kepakaran,
- 5) Koordinasi jadwal kerja sesuai dengan agenda dan jadwal kerja DPD di tingkat nasional,
- 6) Kampanye rumah aspirasi,
- 6) Implementasi rencana kerja.

Ruang lingkup fokus/sektor yang didukung: (Check one)

- 1-1 Asupan makanan dan gizi
- 1-2 Kesehatan
- 1-3 Pendidikan
- 1-4 Ekonomi Lokal
- 1-5 Kesenjangan Gender
- 1-6 Infrastruktur Dasar
- 1-7 Pengembangan Kapasitas di tingkat desa
- 2-0 Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan
- 3-0 Pelatihan Keterampilan/ Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 4-0 Lain-lain

Penguatan sistem lembaga perwakilan guna mendukung desentralisasi

Lokasi/ruang lingkup wilayah: (Check working area level, and list the name of the places)

- Provinsi:
- Kabupaten:
- Kota:
- Distrik(Kecamatan):
- Kampung/Desa:

Provinsi	Papua	Papua Barat
Kabupaten	Jayapura	Manokwari
Kota		
Distrik (Kecamatan)		
Kampung / Desa		

Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota, CSO, Lembaga Adat, Organisasi Perempuan, Organisasi agama, dll

Pola Pelaksanaan:

Pengumpulan aspirasi dan isu2 utama, konsultasi publik, penyediaan informasi agenda dan hasil2 persidangan DPD, pembuatan *policy papers*, pembuatan media informasi dan akuntabilitas publik anggota DPD

Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:

Dukungan bagi DPD sangat penting dalam reformasi kelembagaan pemerintah dan juga terkait dengan dukungan bagi desentralisasi dan perjuangan aspirasi daerah dalam kebijakan nasional.

Tidak seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) yang merupakan kelembagaan politik dengan partai politik sebagai infrastrukturnya, DPD sebagai lembaga politik (parlemen) belum memiliki infrastruktur yang sudah mantap dan berkesinambungan di daerah. Program Rumah Aspirasi merupakan program yang digagas dan dimiliki oleh DPD dan mendapatkan dukungan dari kantor SOFEL. Implementasi program ini dimulai pada provinsi-provinsi di KTI. Replikasi pada Kawasan Tengah dan Barat Indonesia sedang dipersiapkan oleh DPD.

Harmonisasi Bantuan untuk Pembangunan yang Berpusat pada Masyarakat



Lembar Informasi Proyek

LIP 4-0-004

Kontribusi dari **USAID**

<p>Judul Proyek:</p> <p>Inisiatif Pemerintahan Kepala Burung</p>	<p>Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email):</p> <p>Local Governance Support Program (LGSP) Gedung Burs Efek Jakarta Tower 1 Lantai 29 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190</p> <p>Tel. +62-21-5151755 Fax +62-21-5151752</p> <p>Kontak : Mr. Geoff Swenson Direktur Operasi Lapangan LGSP</p> <p>gswenson@lgsp.or.id</p>
<p>Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyandang dana):</p> <p>Jumlah dana \$3.000.000 Sumber : Yayasan BP (\$1,5 juta) dan USAID DDG (\$1,5 juta)</p>	<p>Mitra penanggung jawab:</p> <p>Calon mitra pemerintah daerah meliputi Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fak-fak dan Kabupaten Kaimana</p>
<p>Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas):</p> <p>Inisiatif Pemerintahan Kepala Burung mendukung pembangunan dan pengembangan kapasitas lembaga-lembaga dari pemerintah daerah dan dewan-dewan setempat. Disamping untuk memperkuat tata pemerintahan daerah sebagai suatu prioritas dalam haknya sendiri, program ini juga bertujuan untuk mengembangkan kapasitas pemerintah daerah guna memastikan bahwa pengelolaan pendapatan daerah sudah ditingkatkan, agar dapat mempermudah pembangunan yang dikemukakan oleh masyarakat, serta untuk meningkatkan pertumbuhan (ekonomi) yang lebih layak di wilayah Kepala Burung.</p>	
<p>Ruang lingkup fokus/sektor yang didukung: (Check one)</p> <p><input type="checkbox"/> 1-1 Asupan makanan dan gizi <input type="checkbox"/> 1-2 Kesehatan <input type="checkbox"/> 1-3 Pendidikan <input type="checkbox"/> 1-4 Ekonomi Lokal <input type="checkbox"/> 1-5 Kesetaraan Gender <input type="checkbox"/> 1-6 Infrastruktur Dasar</p>	<p>Lokasi/ruang lingkup wilayah: (Check working area level, and list the name of the places)</p> <p><input type="checkbox"/> Provinsi: <input checked="" type="checkbox"/> Kabupaten: <input type="checkbox"/> Kota: <input type="checkbox"/> Distrik(Kecamatan): <input type="checkbox"/> Kampung/Desa:</p>

<input type="checkbox"/> 1-7 Pengembangan Kapasitas di tingkat desa <input type="checkbox"/> 2-0 Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan <input type="checkbox"/> 3-0 Pelatihan Keterampilan/ Pengembangan Sumber Daya Manusia <input checked="" type="checkbox"/> 4-0 Lain-lain	Provinsi	Papua	Papua Barat
	Kabupaten		Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, and Kabupaten Kaimana.
	Kota		Kota Sorong
	Distrik (Kecamatan)		
	Kampung / Desa		

Pola Pelaksanaan:

Bantuan LGSP mencerminkan sifat jelas dari masyarakat Papua dan Papua Barat, kepentingan suku yang berkelanjutan, serta masyarakat yang tradisional dan tata pemerintahan diberlakukan di Papua dan Papua Barat oleh UU Otonomi Khusus (UU no. 21/2001)

LGSP menawarkan gabungan bantuan, dari bantuan teknis, pengembangan kapasitas, pelatihan, peralatan, pencetakan/penerbitan serta informasi kepada pemerintah daerah sambil meningkatkan hubungan interaksi yang lebih besar antara para warganya dan pemerintah daerahnya. Bantuan ini ditingkatkan karena adanya perencanaan yang kritis dan bantuan membuat anggaran, perbaikan manajemen keuangan, pengembangan dewan setempat, serta partisipasi dari warganya, tetapi akan disesuaikan dengan kebutuhannya, serta prioritas khas pada partisipasi pemerintah daerah.

LGSP berkolaborasi dengan Mitra BP Tangguh Project, Yayasan Inovasi Pemerintah Daerah (YIPD) yang ditugaskan oleh BP untuk memberikan bantuan teknis dan dukungan pengembangan kapasitas kepada Kabupaten Teluk Bituni yang baru saja dibentuk.

Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:

Proyek ini masih dalam tahap awal, sehingga belum ada hikmah pembelajaran yang dapat dirangkum. Saat ini studi dasar (Base –line study) sedang dilaksanakan dan proyek sedang menata kantornya di kota Sorong.

Harmonisasi Bantuan untuk Pembangunan yang Berpusat pada Masyarakat



Lembar Informasi Proyek

LIP 4-0-005

Kontribusi dari **USAID**

<p>Judul Proyek:</p> <p>Demokrasi dan Tata Pemerintahan Desentralisasi – Inisiatif Pemerintahan Kepala Burung</p>	<p>Instansi pelaksana (termasuk alamat, telepon, fax dan email):</p> <p>Reasearch Triangle Institute Gedung Burs Efek Jakarta Tower 1 Lantai 29 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190</p> <p>Tel. +62-21-5151755 Fax +62-21-5151752</p> <p>Kontak : Mr. Geoff Swenson Direktur Operasi Lapangan LGSP</p> <p>gswenson@lgsp.or.id</p>
<p>Pembiayaan (anggaran dan lembaga penyanggah dana):</p> <p>Tingkat pendanaan wilayah tidak tersedia</p>	<p>Mitra penanggung jawab:</p> <p>Mitra pemerintah daerah potensial termasuk Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fak-fak dan kabupaten Kaimana</p>
<p>Deskripsi Naratif dari Proyek (tujuan dan aktivitas):</p> <p>Inisiatif Pemerintahan Kepala Burung mendukung pembangunan dan pengembangan kapasitas lembaga-lembaga dari pemerintah daerah dan dewan-dewan setempat. Disamping untuk memperkuat tata pemerintahan daerah sebagai suatu prioritas dalam haknya sendiri, program ini juga bertujuan untuk mengembangkan kapasitas pemerintah daerah guna memastikan bahwa pengelolaan pendapatan daerah sudah ditingkatkan, untuk mempermudah pembangunan yang dikemukakan oleh masyarakat, serta untuk meningkatkan pertumbuhan (ekonomi) yang lebih layak di wilayah Kepala Burung.. Program ini adalah untuk masa 2006 – 2009. Program ini dilaksanakan atas kerja sama dengan British Petroleum melalui aliansi antara pemerintah – swasta selama beberapa tahun.</p>	
<p>Ruang lingkup fokus/sektor yang didukung: (Check one)</p> <p><input type="checkbox"/> 1-1 Asupan makanan dan gizi</p> <p><input type="checkbox"/> 1-2 Kesehatan</p> <p><input type="checkbox"/> 1-3 Pendidikan</p>	<p>Lokasi/ruang lingkup wilayah: (Check working area level, and list the name of the places)</p> <p><input type="checkbox"/> Provinsi:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Kabupaten:</p>

<input type="checkbox"/> 1-4 Ekonomi Lokal <input type="checkbox"/> 1-5 Kesetaraan Gender <input type="checkbox"/> 1-6 Infrastruktur Dasar <input type="checkbox"/> 1-7 Pengembangan Kapasitas di tingkat desa <input type="checkbox"/> 2-0 Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan <input type="checkbox"/> 3-0 Pelatihan Keterampilan/ Pengembangan Sumber Daya Manusia <input checked="" type="checkbox"/> 4-0 Lain-lain: Tata Pemerintahan Daerah yang bersih	<input checked="" type="checkbox"/> Kota: <input type="checkbox"/> Distrik(Kecamatan): <input type="checkbox"/> Kampung/Desa: <table border="1" data-bbox="842 322 1385 730"> <tr> <td>Provinsi</td> <td>Papua Barat</td> </tr> <tr> <td>Kabupaten</td> <td>Sorong Selatan, Manokwari, Fakfak, dan Kaimana.</td> </tr> <tr> <td>Kota</td> <td>Sorong</td> </tr> <tr> <td>Distrik (Kecamatan)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kampung / Desa</td> <td></td> </tr> </table>	Provinsi	Papua Barat	Kabupaten	Sorong Selatan, Manokwari, Fakfak, dan Kaimana.	Kota	Sorong	Distrik (Kecamatan)		Kampung / Desa	
Provinsi	Papua Barat										
Kabupaten	Sorong Selatan, Manokwari, Fakfak, dan Kaimana.										
Kota	Sorong										
Distrik (Kecamatan)											
Kampung / Desa											
<p>Pola Pelaksanaan:</p> <p>LGSP menawarkan gabungan bantuan, dari bantuan teknis, pengembangan kapasitas, pelatihan, peralatan, pencetakan/penerbitan serta informasi kepada pemerintah daerah sambil meningkatkan hubungan interaksi yang lebih besar antara para warganya dan pemerintah daerahnya. Bantuan ini ditingkatkan karena adanya perencanaan yang kritis dan bantuan membuat anggaran, perbaikan manajemen keuangan, pengembangan dewan setempat, serta partisipasi dari masyarakat, tetapi akan disesuaikan pada kebutuhannya, serta prioritas khas pada partisipasi pemerintah daerah.</p>											
<p>Hikmah pembelajaran dan rangkaian keberhasilan:</p> <p>Program Baru.</p>											